

SEKOLAH RAKYAT DAN PESANTREN: DUA MODEL PENDIDIKAN BERBASIS KERAKYATAN DI INDONESIA

Andi Tiara Nur Fadhillah¹, M. Irhas Rasuli², Sudadi³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹ anditiaranurfadhillah27@gmail.com , ² irhas1924@gmail.com ,

³ sudadi@uinsi.ac.id

ABSTRACT

This article examines two people-based education models in Indonesia, namely Sekolah Rakyat (People's School) and Pesantren (Islamic Boarding School), in the context of equitable access to education and poverty alleviation. Sekolah Rakyat is the latest program under President Prabowo Subianto's administration, launched under Presidential Instruction Number 8 of 2025, designed as a free boarding school for children from poor and extremely poor families. Pesantren, on the other hand, is Indonesia's oldest Islamic educational institution, which has for centuries played a role as a center for community-based education rooted in populist values. Using a library research approach and comparative analysis, this article examines the similarities, differences, and potential synergies between the two models from historical, philosophical, curricular, governance, and social relevance dimensions. The findings indicate that both models share the same philosophical roots - commitment to the people and the effort to break the chain of poverty through education - yet differ in institutional approach, value foundation, and financing mechanisms. This article recommends the need for strategic synergy and collaboration between Sekolah Rakyat and Pesantren as complementary people's education movements toward the realization of equitable, character-based, and competitive education in Indonesia.

Keywords: Sekolah Rakyat, Pesantren, People's Education, Educational Equity, Poverty Alleviation

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dua model pendidikan berbasis kerakyatan di Indonesia, yaitu Sekolah Rakyat dan Pesantren, dalam konteks pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan program terbaru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, dirancang sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sementara itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah berabad-abad berperan sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas dan nilai-nilai kerakyatan. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis komparatif, artikel ini menelaah persamaan, perbedaan, dan potensi sinergi antara kedua model tersebut dari dimensi sejarah, filosofi, kurikulum, tata kelola, dan relevansi sosialnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua model memiliki akar filosofis yang sama, yaitu keberpihakan kepada rakyat dan upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, namun berbeda dalam pendekatan kelembagaan, basis nilai, dan mekanisme pembiayaan. Artikel ini merekomendasikan perlunya

sinergi dan kolaborasi strategis antara Sekolah Rakyat dan Pesantren sebagai gerakan pendidikan kerakyatan yang saling melengkapi demi terwujudnya pendidikan yang merata, berkarakter, dan berdaya saing di Indonesia.

Kata Kunci: Sekolah Rakyat, Pesantren, Pendidikan Kerakyatan, Pemerataan Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih belum merata. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 mengalami peningkatan di seluruh jenjang. Selain itu, sebagian besar kepala rumah tangga miskin ekstrem masih berpendidikan sekolah dasar ke bawah, sehingga kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan cenderung membentuk lingkaran yang saling mengunci (Badan Pusat Statistik, 2024). Data Kementerian Pendidikan pada Januari 2025 juga menunjukkan bahwa sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kemendikbudristek, 2025, dalam Polkam RI, 2025).

Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang lahirnya Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah yang secara resmi tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sejak mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat dikembangkan sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta dirancang untuk diperluas secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia (Republik Indonesia, 2025; Kementerian PAN-RB RI, 2025; Presiden RI, 2025).

Di sisi lain, jauh sebelum negara hadir dengan program pendidikan modern, pesantren telah lebih dahulu menjadi salah satu benteng pendidikan kerakyatan. Sebagai lembaga pendidikan Islam

tertua di Indonesia, pesantren telah lama mengabdikan diri pada masyarakat bawah, mendidik generasi bangsa tanpa selalu bergantung pada kemampuan ekonomi peserta didik, dan mengintegrasikan pembentukan karakter dengan pengetahuan agama. Pesantren dapat dipahami sebagai model pendidikan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, jauh sebelum konsep pendidikan berbasis komunitas populer dalam kajian pendidikan modern (Mastuhu, 1994; Riskal Fitri & Ondeng, 2022).

Sekolah Rakyat dan pesantren bergerak di atas landasan yang berdekatan, yakni keberpihakan kepada kelompok yang terpinggirkan dan keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan penting menuju perubahan sosial. Meskipun demikian, kajian komparatif yang menelaah keduanya secara akademis masih relatif terbatas. Artikel ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan mengkaji persamaan, perbedaan, serta potensi kolaborasi antara dua model pendidikan berbasis kerakyatan tersebut.

Secara spesifik, artikel ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sejarah dan

filosofi pendidikan kerakyatan dalam konteks Sekolah Rakyat dan pesantren? Kedua, apa persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua model tersebut dari aspek kelembagaan dan kurikulum? Ketiga, bagaimana potensi sinergi antara Sekolah Rakyat dan pesantren dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan dengan metode analisis komparatif. Studi kepustakaan dipilih karena tujuan utama artikel ini bukan melakukan pengujian lapangan, melainkan menelaah gagasan, kebijakan, regulasi, dan temuan ilmiah yang relevan dengan Sekolah Rakyat dan pesantren. Sumber data mencakup regulasi pemerintah, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, buku, serta sumber daring terpercaya (Zed, 2008).

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penulis mengidentifikasi literatur utama mengenai Sekolah Rakyat dan pesantren. Kedua, data dikelompokkan ke dalam beberapa

dimensi, yaitu sejarah dan akar filosofis, kurikulum dan metode pembelajaran, kelembagaan dan tata kelola, pembiayaan dan akses, serta relevansi sosial. Ketiga, masing-masing dimensi dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu antara kedua model pendidikan tersebut. Keempat, hasil perbandingan ditafsirkan secara kritis untuk merumuskan kemungkinan sinergi antara Sekolah Rakyat dan pesantren sebagai bagian dari gerakan pendidikan kerakyatan.

Keterbatasan artikel ini terletak pada sifatnya yang konseptual dan berbasis dokumen. Artikel ini belum menyajikan hasil observasi langsung di satuan Sekolah Rakyat atau pesantren tertentu. Namun, pembahasan tetap relevan sebagai dasar akademik untuk memahami relasi konseptual antara kebijakan pendidikan negara dan lembaga pendidikan berbasis komunitas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah dan Filosofi Pendidikan Kerakyatan

a. Sekolah Rakyat: Negara Hadir untuk Rakyat Miskin

Program Sekolah Rakyat lahir dari keprihatinan terhadap

ketimpangan akses pendidikan. Dengan filosofi "Cerdas Bersama, Tumbuh Setara", program ini dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang tidak hanya menanggung biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan kebutuhan dasar peserta didik, seperti seragam, makanan, asrama, dan perlengkapan sekolah. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga dalam kategori desil 1 dan 2, yaitu kelompok paling miskin yang rawan putus sekolah dan sulit mengakses layanan pendidikan berkualitas (Sekretariat Negara RI, 2025; Kementerian PAN-RB RI, 2025).

Secara historis, semangat sekolah untuk rakyat bukanlah hal baru dalam khazanah pendidikan Indonesia. Gagasan tersebut dapat ditelusuri sejak masa pergerakan nasional, ketika tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang berpihak kepada rakyat jelata. Dalam konteks kontemporer, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk penerusan semangat tersebut melalui kebijakan negara yang lebih terstruktur, terukur, dan didukung oleh lintas kementerian serta pemerintah

daerah (Tilaar, 2002; Republik Indonesia, 2025).

b. Pesantren: Kerakyatan yang Berakar pada Tradisi

Berbeda dengan Sekolah Rakyat yang lahir dari inisiatif negara, pesantren tumbuh secara organik dari bawah. Lembaga ini berdiri atas inisiatif kiai atau ulama yang kemudian memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat. Pesantren berakar pada nilai-nilai keislaman seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah, dan kebebasan berpikir. Nilai-nilai tersebut menjadikan pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan juga pusat pembentukan moral, sosial, dan kultural masyarakat (Mastuhu, 1994; Arief & Assya'bani, 2023).

Filosofi kerakyatan pesantren tercermin dalam tradisi nyantri yang tidak semata-mata mensyaratkan kemampuan finansial. Dalam banyak pesantren, santri dari keluarga tidak mampu tetap diberi ruang untuk belajar melalui mekanisme pengabdian, gotong royong, beasiswa internal, atau dukungan masyarakat. Pengakuan negara terhadap peran historis pesantren kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang

memberi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren dan membuka akses pendanaan dari pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019; Riskal Fitri & Ondeng, 2022).

2. Kurikulum dan Metode Pembelajaran

a. Sekolah Rakyat: Kurikulum Nasional Berkarakter

Sekolah Rakyat menggunakan kurikulum nasional yang berlaku, dengan penguatan pada pembinaan karakter, layanan gizi dan kesehatan, serta pengasuhan asrama selama dua puluh empat jam. Selain pembelajaran akademik, peserta didik juga diarahkan untuk mengenali potensi diri melalui pemetaan bakat dan minat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya diarahkan pada capaian kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter, kesehatan, dan pengembangan potensi individual (Detik News, 2026; Kementerian PAN-RB RI, 2025).

Keunikan Sekolah Rakyat dibandingkan sekolah formal biasa terletak pada model *full boarding* yang memastikan kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi secara lebih memadai.

Model ini relevan dengan realitas bahwa anak dari keluarga miskin sering menghadapi hambatan belajar bukan hanya karena biaya sekolah, tetapi juga karena masalah gizi, lingkungan rumah, dan ketidakstabilan sosial keluarga. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai intervensi sosial terpadu (Kementerian PAN-RB RI, 2025; Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025).

b. Pesantren: Kurikulum Integratif Berbasis Kitab Kuning

Pesantren memiliki kekhasan kurikulum yang tidak dimiliki oleh banyak lembaga pendidikan formal, yaitu kitab kuning sebagai inti pembelajaran. Kurikulum pesantren umumnya mengintegrasikan ilmu agama, seperti tafsir, hadis, fikih, akidah, dan tasawuf, dengan ilmu umum dalam berbagai variasi sesuai tipologi pesantren, baik salaf, modern, maupun terpadu. Metode sorogan, bandongan, dan halaqah menjadi tradisi pembelajaran yang menekankan kedalaman, kedekatan guru-murid, dan kesinambungan keilmuan (Jurnal Media Akademik,

2024; Pranata, Setiawan, & Ramdhani, 2024).

Pesantren juga kuat dalam pendidikan karakter yang berlangsung melalui *hidden curriculum*. Nilai-nilai tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran formal, tetapi juga melalui budaya hidup, rutinitas ibadah, kepatuhan pada adab, kedisiplinan, dan interaksi sosial santri sehari-hari. Dalam konteks era digital, tantangan pesantren adalah mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam ekosistem pembelajaran tanpa menghilangkan nilai tradisi yang menjadi ruh lembaga (Abdurrahman, 2023; Hasan, Taufiq, & Elmhemit, 2023).

3. Kelembagaan dan Tata Kelola

a. Sekolah Rakyat: Model Top-Down Berbasis Negara

Dari sisi kelembagaan, Sekolah Rakyat menggunakan model *top-down* berbasis negara. Inisiatif, pembiayaan, standar operasional, rekrutmen pendidik, dan pengawasan program berada dalam koordinasi pemerintah. Kementerian Sosial berperan sebagai salah satu penanggung jawab utama, dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Guru direkrut melalui skema formal, sedangkan

fasilitas yang sudah tersedia dimanfaatkan untuk mempercepat operasionalisasi program (Ibnu & Kurniawan, 2025; Sekretariat Negara RI, 2025).

Keunggulan utama model ini adalah skalabilitas. Dengan dukungan APBN dan koordinasi lintas lembaga, Sekolah Rakyat dapat direplikasi secara lebih cepat dan merata di berbagai wilayah. Namun, model ini juga memiliki tantangan, seperti ketergantungan pada anggaran negara, risiko birokratisasi, dan kemungkinan lemahnya rasa kepemilikan masyarakat lokal apabila pelaksanaannya tidak melibatkan komunitas secara bermakna (Presiden RI, 2025; Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025).

b. Pesantren: Model Bottom-Up Berbasis Komunitas

Pesantren menggunakan model tata kelola yang lebih bersifat *bottom-up* dan berbasis komunitas. Lembaga ini lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap kiai atau pengasuh pesantren. Pembiayaan pesantren biasanya bersumber dari iuran santri, wakaf, donasi alumni, usaha mandiri, serta bantuan masyarakat. Model ini menciptakan kemandirian institusional yang tinggi,

tetapi juga dapat menghadirkan tantangan berupa ketimpangan kualitas antarpesantren, keterbatasan sumber daya, dan persoalan suksesi kepemimpinan (Prasetyo, 2022; Arief & Assya'bani, 2023).

Tata kelola pesantren yang berbasis kepercayaan komunal membuat pesantren memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat sosial, ekonomi, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena berakar kuat pada lingkungan lokal, pesantren sering kali lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan lembaga yang sepenuhnya dikelola secara birokratis (Kholifah, 2022; Rahman, Huda, & Ningsih, 2022).

Pesantren merupakan lahirnya sebuah peradaban yang mencetak generasi penerus seperti *Agent Of Change* bukan hanya dari sisi akademik melainkan dari non akademik berupa tingkat akhlak yang tinggi (akhlakul karimah) melekat pada diri santri yaitu menghormati guru dan orang tuanya sebagai bentuk takzim yang agung.

4. Pembiayaan dan Akses

a. Sekolah Rakyat: Gratis Total Berbiaya Negara

Sekolah Rakyat sepenuhnya gratis dan dibiayai negara. Tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau keluarganya. Model pembiayaan ini dirancang untuk menjamin bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga paling miskin untuk mengakses pendidikan berkualitas. Seleksi peserta didik dilakukan dengan mengacu pada data kemiskinan yaitu dari desil satu dan desil dua serta pemeriksaan akademik, psikologis, dan kesehatan agar program lebih tepat sasaran (Detik News, 2026; Kementerian PAN-RB RI, 2025).

Meski demikian, pendekatan seleksi berbasis status kemiskinan perlu dikelola secara sensitif agar tidak menimbulkan stigma sosial bagi peserta didik. Karena itu, penguatan mental, pendampingan psikologis, dan pembentukan rasa percaya diri menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun martabat dan

kapasitas anak dari keluarga miskin untuk berkembang secara lebih setara (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025).

b. Pesantren: Mandiri dengan Tradisi Gotong Royong

Pembiayaan pesantren jauh lebih beragam. Pesantren besar dapat memiliki sumber pendanaan dari iuran santri, unit usaha, wakaf, dan jaringan alumni. Sebaliknya, pesantren kecil di daerah terpencil sering bergantung pada donasi masyarakat dan kerja sukarela. Tradisi santri kalong, pembebasan biaya bagi santri yatim, dan dukungan bagi santri dari keluarga tidak mampu menunjukkan bahwa pesantren telah lama mempraktikkan prinsip pendidikan kerakyatan dalam bentuk yang organik (Riskal Fitri & Ondeng, 2022).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren memperoleh dasar hukum untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Namun, distribusi dan besaran bantuan masih perlu terus diperbaiki agar lebih proporsional dengan kebutuhan riil pesantren, terutama di daerah terpencil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pendanaan pesantren

menjadi agenda penting agar keberpihakan sosial pesantren dapat berjalan berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019; Prasetyo, 2022).

5. Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan

Tabel berikut merangkum perbandingan antara Sekolah Rakyat dan pesantren berdasarkan beberapa dimensi utama.

Dimensi	Sekolah Rakyat	Pesantren
Asal-usul	Kebijakan negara melalui Inpres No. 8 Tahun 2025	Inisiatif ulama dan komunitas secara organik
Filosofi dasar	Pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan	Tafaquh fiddin, pembentukan karakter, dan pemberdayaan umat
Basis nilai	Nasionalisme dan keadilan sosial	Keislaman, kearifan lokal, dan gotong royong
Kurikulum	Kurikulum nasional dengan penguatan karakter dan	Kitab kuning, pendidikan agama, dan kurikulum umum sesuai tipologi pesantren

Dimensi	Sekolah Rakyat	Pesantren
	pengasuhan asrama	
Metode	Modern, terstandar, dan berbasis layanan terpadu	Sorogan, bandongan, halaqah, pembiasaan, dan keteladanan
Pembiayaan	APBN dan gratis total bagi peserta didik	Mandiri, iuran santri, wakaf, donasi, usaha pesantren, dan bantuan negara
Tata kelola	Top-down, terkoordinasi oleh Negara	Bottom-up, berbasis kiai dan komunitas
Sasaran	Anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem	Semua kalangan, dengan keberpihakan historis pada dhuafa
Usia program	Baru dan berbasis kebijakan kontemporer	Ratusan tahun dan berakar pada tradisi masyarakat
Pengawasan	Kemensos, kementerian terkait, dan pemerintah daerah	Kemenag, pengasuh pesantren, yayasan, dan mekanisme internal lembaga

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dan pesantren berbeda dalam pendekatan kelembagaan, sistem pembiayaan, serta basis nilai. Namun, keduanya memiliki persamaan mendasar, yaitu menjadi respons terhadap ketidakadilan akses pendidikan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan antara keduanya tidak perlu dibaca sebagai pertentangan, tetapi sebagai potensi saling melengkapi antara kebijakan negara dan kekuatan komunitas (Jurnal Media Akademik, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019).

6. Potensi Sinergi dan Kolaborasi

Sekolah Rakyat dan pesantren sebaiknya tidak dipandang sebagai dua model pendidikan yang saling bersaing. Keduanya justru memiliki potensi sinergi yang besar. Setidaknya terdapat empat area kolaborasi strategis yang dapat dikembangkan.

Pertama, pemanfaatan infrastruktur pesantren. Pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi anak dari

keluarga miskin, terutama di daerah yang belum mudah dijangkau oleh program negara. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui skema kemitraan yang tetap menjaga identitas pesantren dan memastikan standar layanan pendidikan yang memadai (Rahman et al., 2022).

Kedua, pertukaran model kurikulum. Sekolah Rakyat dapat belajar dari kekuatan pesantren dalam pendidikan karakter berbasis nilai spiritual, adab, dan keteladanan. Sebaliknya, pesantren dapat mengadopsi sebagian praktik modern Sekolah Rakyat dalam layanan psikologis, pemetaan bakat, manajemen asrama, serta penguatan data pendidikan. Pertukaran ini penting agar kedua model tidak kehilangan identitas, tetapi semakin kuat dalam menjawab kebutuhan zaman (Pranata et al., 2024; Hasan et al., 2023).

Ketiga, kolaborasi dalam pemberdayaan komunitas. Program intervensi sosial Sekolah Rakyat yang menyentuh keluarga peserta didik dapat bersinergi dengan jaringan sosial pesantren yang telah lama dipercaya masyarakat. Pesantren dapat menjadi penghubung antara program negara dan kebutuhan riil

masyarakat lokal, sehingga kebijakan pendidikan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial (Kholifah, 2022).

Keempat, transformasi digital bersama. Baik Sekolah Rakyat maupun pesantren menghadapi tantangan adaptasi teknologi. Kolaborasi dalam pengembangan platform pembelajaran, administrasi digital, dan literasi teknologi dapat memperkuat layanan pendidikan. Namun, digitalisasi perlu dilakukan secara selektif agar teknologi berfungsi sebagai alat penguatan pendidikan, bukan menggantikan nilai-nilai dasar yang menjadi karakter lembaga (Abdurrahman, 2023; Widodo & Husni, 2025).

D. Kesimpulan

Artikel ini telah mengkaji secara komparatif dua model pendidikan berbasis kerakyatan di Indonesia, yaitu Sekolah Rakyat dan pesantren, dari dimensi sejarah, filosofi, kurikulum, kelembagaan, pembiayaan, dan relevansi sosial. Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat tiga simpulan utama.

Pertama, Sekolah Rakyat dan pesantren memiliki akar filosofis yang sama, yaitu keberpihakan kepada

kelompok yang terpinggirkan dan keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumen transformasi sosial. Keduanya hadir sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan untuk semua, meskipun tumbuh dari konteks kelembagaan yang berbeda. Kedua, dari sisi tata kelola, Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan *top-down* yang diinisiasi dan dibiayai negara, sedangkan pesantren merupakan model *bottom-up* yang lahir dari komunitas dan bertumpu pada kepercayaan sosial. Perbedaan ini bukan kelemahan, melainkan modal komplementaritas yang dapat memperkaya desain pendidikan kerakyatan di Indonesia.

Ketiga, sinergi antara Sekolah Rakyat dan pesantren merupakan kebutuhan strategis. Indonesia terlalu besar dan beragam untuk hanya mengandalkan satu model pendidikan. Karena itu, kolaborasi antara kebijakan negara dan kekuatan komunitas perlu dikembangkan agar pendidikan yang merata, berkarakter, dan berdaya saing dapat diwujudkan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2023). Konsep pembaharuan pendidikan

- pesantren di era digital. UIN Sunan Gunung Jati.
- Arief, M., & Assya'bani, R. (2023). Eksistensi manajemen pesantren di era digital. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2548-2567.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator kesejahteraan rakyat 2024. Jakarta: BPS RI.
- Detik News. (2026, Januari). 8 fakta Sekolah Rakyat yang akan diresmikan Presiden Prabowo. <https://news.detik.com/berita/d-8302091>
- Hasan, M., Taufiq, M., & Elmhemit, H. (2023). Digital transformation of Islamic education in pesantren Madura. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 1-16. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v18i2.10535>
- Ibnu, K. I. M., & Kurniawan, T. (2025). Implementasi kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 15(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v15i1.3739>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Jurnal Media Akademik. (2024). Analisis perbedaan antara sistem pendidikan sekolah umum dan pesantren di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1913>
- Kementerian PAN-RB RI. (2025). Sekolah Rakyat, program pemutus rantai kemiskinan. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/sekolah-rakyat-program-pemutus-rantai-kemiskinan>
- Kementerian PAN-RB RI. (2025). Sekolah Rakyat, terobosan Presiden Prabowo putus mata rantai kemiskinan. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/sekolah-rakyat-terobosan-presiden-prabowo-putus-mata-rantai-kemiskinan>
- Kholifah, A. (2022). Strategi pendidikan pesantren menjawab tantangan sosial di era digital. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4967-4978. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2811>
- Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS.
- Polkam RI. (2025). Sekolah Rakyat kontribusi nyata pemerataan pendidikan. <https://polkam.go.id/sekolah-rakyat-kontribusi-nyata-pemerataan-pendidikan/>
- Pranata, A. S., Setiawan, Y., & Ramdhani, D. (2024). Konsep dan implementasi inovasi pendidikan Islam. *Journal of Classroom Action Research*, 6(1), 119-124. <https://doi.org/10.29303/jcar.v6i1.7040>

- Prasetyo, M. A. M. (2022). Manajemen strategi pengembangan pesantren pasca Covid-19 di Aceh. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 115-131. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i2.318>
- Presiden RI. (2025, 11 September). Presiden Prabowo targetkan 500 Sekolah Rakyat untuk perluas akses pendidikan. <https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-targetkan-500-sekolah-rakyat-untuk-perluas-akses-pendidikan/>
- Rahman, F., Huda, M., & Ningsih, T. (2022). Model implementasi pendidikan pesantren pada sekolah formal. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 17(1), 95-112.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Riskal Fitri, & Ondeng, S. (2022). Pesantren di Indonesia: Lembaga pembentukan karakter. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 42-49.
- Sekretariat Negara RI. (2025, 14 April). Pemerintah targetkan 53 Sekolah Rakyat tuntas Juni 2025. https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_targetkan_53_sekolah_rakyat_tuntas_juni_2025
- Tilaar, H. A. R. (2002). Manajemen pendidikan nasional: Kajian pendidikan masa depan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2025, Agustus). Sekolah Rakyat Indonesia: Terobosan pendidikan gratis atau kebijakan kontroversial? <https://umj.ac.id/opini/sekolah-rakyat-indonesia-terobosan-pendidikan-gratis-atau-kebijakan-kontroversial/>
- Widodo, A. A., & Husni, M. (2025). Strategi digitalisasi pendidikan pesantren dalam internalisasi nilai Aswaja bagi Generasi Z di era teknologi. *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 375-386. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.851>
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.